

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Filipina adalah negara di wilayah Asia Tenggara yang pada periode 2009-2016, Filipina dihadapkan pada berbagai persoalan bidang keamanan, diantaranya adalah peredaran narkotika dan obat bius, yang terdiri dari berbagai jenis, diantaranya opium hingga ganja dan ekstasi. Keberadaan narkotika dan obat bius di Filipina ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari industri dalam negeri Filipina dan berasal dari jaringan narkotika internasional.

Peredaran narkotika dan obat bius di Filipina sebagai persoalan sosial dan keamanan yang serius kemudian mendorong pemerintah Filipina untuk melancarkan war on drugs. Kebijakan ini dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen, dari fungsi kepolisian sebagai institusi utama yang di dukung dengan insitusi angkatan bersenjata Filipina. War on drugs ini dijalankan langsung atas perintah Presiden Duterte beberapa saat pasca terpilih sebagai presiden Filipina.

Implementasi war on drugs ternyata tidak lepas dari figur persoanalitas Rodrigo Duterte yang berupaya keras mewujudkan keamanan Filipina yang kondusif bersamaan dengan kebijakan war on terror. Kemudian kebijakan war on drugs juga tidak lepas dari dukungan partai politik dan masyarakat yang memotivasi Duterte untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Kebijakan war on drugs pada tahun 2016 merupakan bagian dari keputusan formal dari pemerintah Filipina yang telah disetujui dan memperoleh legitimasi dari parlemen hingga aparatur/birokrat, khususnya angkatan bersenjata dan kepolisian nasional Filipina. Sebelum era kepemimpinan Duterte, baik Benigno Aquino II, Gloria Aroyo ataupun rezim-

rezim sebelumnya, penanganan peredaran narkoba dan obat bius dijalankan melalui penegakan hukum secara konvensional sehingga tidak mampu menjadi solusi yang bersifat mendasar sehingga inilah yang menyebabkan penanganan narkoba dan obat bius di Filipina tidak kunjung dapat terselesaikan sebagai *problem malignancy*.

Kebijakan *war on drugs* di Filipina menunjukkan adanya kepentingan dan motivasi yang begitu besar bagi Duterte yaitu kepentingan pada bidang politik dan keamanan yaitu sebagai wujud upaya Duterte dalam membangun tertib sipil dan hukum. Kepentingan ini telah diutarakan Duterte beberapa saat pasca kemenangannya dalam pemilu presiden Filipina. Selama ini, pemerintah Filipina begitu terbelenggu dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan teknis sehingga kinerjanya tidak optimal, namun melalui semangat dan motivasi yang diberikan Duterte maka kebijakan ini terus berjalan dan menjadi spirit bagi para aparaturnya pelaksana Filipina. Pencapaian tertib sipil dan hukum bagi Duterte adalah prasyarat bagi kelangsungan pembangunan dan stabilitas sipil di Filipina.

Kemudian pada bidang sosial-ekonomi kepentingan Duterte dalam kebijakan *war on drugs* adalah untuk menyelamatkan generasi muda, serta untuk mendukung pemerataan pembangunan. Duterte menganggap bahwa narkoba dan obat bius merupakan persoalan serius yang dapat disetarakan dengan terorisme ataupun human trafficking. Terlebih lagi muncul kekhawatiran tentang meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan remaja di Filipina dari tahun ke tahun, sehingga Duterte khawatir ini akan merusak masa depan Filipina.

Kepentingan selanjutnya adalah pada bidang politik luar negeri kebijakan *war on drugs* Duterte ditujukan untuk membangun citra dan kedaulatan Filipina dalam konstelasi politik internasional. Hal ini penting karena selama ini Filipina seringkali menjadi obyek intervensi asing, termasuk Amerika Serikat, China dan beberapa negara lainnya. Di lain

pihak, *war on drugs*, *war on terror* dan kebijakan keamanan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah Filipina dipandang sarat akan pelanggaran HAM dan lain-lainnya.

## **B. Saran**

Melalui penelitian ini, berhasil dirumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sekaligus bagi kalangan akademisi yang bermanfaat sebagai masukan pada penelitian selanjutnya bahwa :

- a. Kepada para stakeholder di Indonesia bahwa persoalan narkoba dan obat bius merupakan persoalan serius yang dapat dianggap sebagai silent distaster yang dapat menenyapkan generasi muda sebuah bangsa. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang bersifat nasional dengan memfungsikan presiden sebagai pemimpin tertinggi atas kebijakan *war on drugs*. Nantinya mekanisme ini bukan hanya menjadi pedoman bagi aparat/birokrat dibawahnya, namun juga sebagai gerakan moral seluruh elemen masyarakat di Indonesia.
- b. Kepada para akademisi program studi Ilmu Hubungan internasional bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh narkoba dan obat bius sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) terhadap kedaulatan nasional suatu negara. Hal ini penting karena beberapa negara yang dihadapkan persoalan narkoba dan obat bius mengalami berbagai dampak serius, hingga menjadi ancaman yang sangat serius, seperti yang terjadi di Kolombia dan Meksiko. Dengan demikian penelitian ini nantinya dapat diketahui bahwa persoalan keamanan internasional ternyata sudah mengalami pergeseran dari perang konvensional (*real war*) mengarah munculnya *extra*

ordinary crime, seperti halnya peredaran narkotika dan obat bius internasional.